

ISBN 978-623-7550-86-0

BUKU

**EVALUASI PROGRAM KESIAPSIAGAAN
DALAM KEGIATAN DESA TANGGUH
BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN
BANJAR**



 083867708263

 cv.mine7

 mine mine



Penerbit : cv. Mine
Perum Sidorejo Bumi Indah F 153
Rt 11 Ngestiharjo Kasihan Bantul
Mobile : 083867708263
email : cv.mine.7@gmail.com

ISBN 978-623-7550-86-0



9 786237 550860



**EVALUASI PROGRAM KESIAPSIAGAAN DALAM
KEGIATAN DESA TANGGUH BENCANA DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BANJAR**

Prof. Dr. Husaini, SKM, M.Kes
Prof. Dr. Syamsul Arifin, dr. M.Pd., DLP
dr. Agung Biworo, M.Kes
Lenie Marlinae, SKM, MKL
Dr. Tien Zubaidah, SKM, MKL
Laily Khairiyati, SKM, MPH
Agung Waskito, ST, MT
Anugrah Nur Rahmat, SKM
Sherly Theana, SKM
Taufik
Andre Yusufa Febriandy, SKM
M. Gilmani
Winda Saukina Syarifatul Jannah, SKM
Ammara Ulfa Azizah
Raudatul Jinan
Editor
Anugrah Nur Rahmat, SKM
Taufik



**EVALUASI PROGRAM KESIAPSIAGAAN DALAM
KEGIATAN DESA TANGGUH BENCANA DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPDB)
KABUPATEN BANJAR**

Penulis

Prof. Dr. Husaini, SKM, M.Kes

Prof. Dr. Syamsul Arifin, dr. M.Pd., DLP

dkk.

Editor

Anugrah Nur Rahmat, SKM

Taufik

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit CV Mine

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

**© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-
UNDANG**

Cetakan ke-1 Tahun 2021

CV Mine

Perum SBI F153 Rt 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta-

55182 Telp: 083867708263

Email: cv.mine.7@gmail.com

ISBN : 978-623-7550-86-0

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul “Evaluasi Program Kesiapsiagaan dalam Kegiatan Desa Tangguh Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Banjar” ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai konsep evaluasi program kesiapsiagaan dalam kegiatan desa tangguh bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB).

Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini tentu tidak luput dari kekurangan. Selalu ada celah untuk perbaikan. Sehingga, kritik, saran serta masukan dari pembaca sangat kami harapkan dan kami sangat terbuka untuk itu supaya buku ini semakin sempurna dan lengkap.

Banjarbaru, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
DESA TANGGUH BENCANA	1
A. Bencana	1
B. Desa Tangguh Bencana	12
BAB II	23
PROGRAM KESIAPSIAGAAN BENCANA	23
A. Pengertian Kesiapsiagaan	23
B. Tujuan Kesiapsiagaan.....	26
C. Indikator Kesiapsiagaan	27
D. Sifat Kesiapsiagaan	29
E. Elemen-Elemen Penting Kesiapsiagaan	30
F. Upaya Kesiapsiagaan.....	30
BAB III	32
EVALUASI	32
A. Ruang Lingkup Evaluasi	32
B. Evaluasi Program.....	34
C. Tujuan Evaluasi Program	35
D. Tipe Evaluasi	37

E. Jenis Evaluasi	38
BAB IV.....	42
EVALUASI PROGRAM KESIAPSIAGAAN KEGIATAN DESA TANGGUH BENCANA	42
A. Input.....	42
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

DESA TANGGUH BENCANA

A. Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah sebagai berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Sedangkan definisi

bencana (disaster) menurut WHO (2002) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa 21 manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Menurut Coburn, A. W. dkk. 1994. Di dalam UNDP mengemukakan bahwa : Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian yang member meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas norma. Sedangkan Heru Sri Haryanto (2001 : 35) Mengemukakan bahwa: Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta

munculnya kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian bencana diatas, bahwa pada dasarnya pengertian bencana secara umum yaitu suatu kejadian atau 22 peristiwa yang menyebabkan kerusakan berupa sarana prasana maupun struktur sosial yang sifatnya mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal dan kecacauan komunitas, sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan (Lindawati and Wasludin, 2017; Mas"Ula, Siartha and Citra, 2019).

Menurut Webster New World Dictionary (Robert J. Kodoatie, 2006: 67) Pengertian bencana dari berbagai kamus bencana, bahwa bencana merupakan suatu kejadian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan besar dan kemalangan serius yang terjadi secara tiba-tiba. Bencana merupakan suatu kecelakaan yang sangat buruk terutama yang menyebabkan banyak orang meninggal. Carter (Robert J. Kodoatie, 2006: 67) bencana merupakan suatu kejadian alam atau

buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba atau progresive yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga masyarakat yang tertimpa bencana tersebut harus merespon dengan tindakan-tindakan yang luar biasa (Kodoatie and Sjarief, 2006).

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat. Pencegahan bencana adalah rangkaian kegiatan guna mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan risiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam. Penanggulangan bencana 13 merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan dalam upaya pengurangan risiko bencana, kegiatan penanggulangan bencana meliputi tiga tahap yaitu, pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana (Oktari, 2019).

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor
2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.
4. Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

Faktor Penyebab Terjadinya Bencana Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu :

1. Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
2. Faktor non-alam (nonnatural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan (3) Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah “Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana”. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah “Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan

teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu” (MPBI, 2004:5).

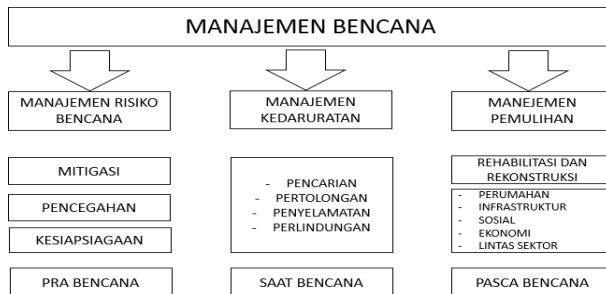
Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (*partisipan*) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut: (1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup; (2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban; (3) Mengembalikan korban bencana dari daerah

penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman; (4) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana; (5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut; (6) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.



Gambar 1.1 Manajemen Bencana

1. Tahap Pra Bencana (mencakup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).
 - a. Pencegahan (prevention)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya : Melarang pembakaran hutan dalam perladangan, Melarang penambangan

batu di daerah yang curam, dan Melarang membuang sampah sembarangan.

b. Mitigasi

Bencana (Mitigation) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui a) pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c) penyelenggaraan pendidikan, 26 penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).²

c. Kesiapsiagaan (Preparedness)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain: a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e) penyiapan lokasi evakuasi; f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan g)

penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

d. Peringatan Dini (Early Warning)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus : Menjangkau masyarakat (accessible), Segera (immediate), Tegas tidak membingungkan (coherent), Bersifat resmi (official)

2. Tahap saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian .

a. Tanggap Darurat (response)

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat

bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penaanggulangan Bencana).

b. Bantuan Darurat (relief)

Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih

3. Tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

a. Pemulihan (recovery)

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial ekonomi budaya, dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b. Rehabilitasi (rehabilitation)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

c. Rekonstruksi (reconstruction)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta Langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan masyarakat kita berharap berkurangnya korban nyawa dan kerugian harta benda. Dan yang terpenting dari manajemen bencana ini adalah adanya suatu langkah konkrit dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak kita harapkan dapat terselamatkan dengan cepat dan tepat dan upaya untuk pemulihan pasca bencana dapat dilakukan dengan secepatnya.

Pengendalian itu dimulai dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan pemerintah atas masalah bencana alam, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk peraturan nagari dan peraturan daerah atas manajemen bencana. Yang tak kalah pentingnya dalam manajemen bencana ini adalah sosialisasi kehatian-hatian terutama pada daerah rawan bencana.

B. Desa Tangguh Bencana

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana yang menjelaskan bahwa Desa Tangguh Bencana adalah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak

bencana yang merugikan.⁴⁰Tujuan dibentuknya Desa Tangguh Bencana adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan antisipasi sejak dini kepada masyarakat, melatih ketangguhan mental dan kesiapsiagaan perilaku masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. Salah satu bentuk penanggulangan bencana adalah melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan.

Adapun indikator keberhasilan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang telah termuat dalam Peraturan Perka Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa Tangguh Bencana yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana pada dasarnya harus melalui beberapa tahapan komponen-komponen untuk mencapai keberhasilan dalam Proses Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan yaitu Pertama, Legislasi yang berkaitan dengan peraturan atau kebijakan terkait dengan Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada tingkat Desa. Kedua,Perencanaan yang berkaitan dengan langkah tindakan yang dilakukan pemerintah Desa Truni dalam melakukan tahapan-tahapan perencanaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melalui Pembentukan Desa tangguh Bencana. Ketiga, Kelembagaan yang beraitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam kelembagaan yang memberikan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Keempat, Pendanaan yang berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada saat pelaksanaan penyelenggaraan

penanggulangan bencana melalui pembentukan Desa tangguh Bencana yang berasal dari dana swadaya masyarakat Desa Truni dan dana dari Aliansi Perempuan Lamongan (APEL). Kelima, Pengembangan Kapasitas yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat dan pengembangan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat Desa Truni dalam menghadapi bencana. Keenam, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana.

Desa tangguh bencana menurut Perka BNPB No.1 Tahun 2012 adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman yang terjadi di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Desa tangguh bencana diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki program mitigasi bencana kepada masyarakat guna mengurangi dampak dan menekan ancaman bencana yang terjadi (BNPB, 2012).

Desa tangguh bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Tujuan pengembangan desa tangguh bencana, yaitu (BNPB, 2012):

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bahaya dari dampakdampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana.
5. Meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana (PRB) antara lain: pihak daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok- kelompok lainnya yang peduli.

Komponen-komponen desa tangguh bencana berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 antara lain (BNPB, 2012):

1. Legislasi merupakan kegiatan penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa. Legislasi adalah peraturan atau kebijakan yang

mengatur tentang penanggulangan bencana yang berkaitan dengan program kegiatan penanggulangan bencana seperti Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan pada tingkat Desa.

2. Perencanaan Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa, yang meliputi: rencana kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas. Perencanaan merupakan kegiatan penyusunan dalam penanggulangan bencana yang memfokuskan pada kegiatan rencana penanggulangan bencana pada tingkat Desa dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan yang meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut : Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi, Rencana Aksi Komunitas dalam menghadapi ancaman dan dampak bencana banjir serta melakukan analisis pengkajian pengurangan risiko dengan tujuan untuk mengurangi dampak risiko bencana banjir.
3. Kelembagaan Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sector dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. Kelembagaan merupakan kegiatan pembentukan forum penanggulangan bencana desa yang berasal dari unsur

pemerintah dan masyarakat, kelompok atau tim relawan penanggulangan bencana baik dari tingkat Desa, Dusun, RT dan RW, dan masyarakat Desa Truni untuk ikut serta berpartisipasi dalam membantu menanggulangi upaya pengurangan risiko bencana serta dilakukan upaya kerjasama antarm pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta ikut membantu untuk mengurangi dampak risiko bencana banjir.

4. Pendanaan Rencana mobilisasi dana dan juga sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan). Pendanaan adalah suatu kegiatan pendanaan atau pembiayaan yang yang digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana yang dimana dana tersebut didapatkan dari swadaya masyarakat Desa Truni, dana dari Aliansi Perempuan Lamongan (APEL) untuk membantu penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan.
5. Pengembangan kapasitas Pelatihan, pendidikan, penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Pengembangan kapasitas merupakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan penyebaran

informasi kepada masyarakat khususnya kepada kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan resiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-structural. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang memfokuskan pada pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kegiatan pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Adapun tujuan dari penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi dampak dan risiko bencana banjir serta memberikan penanggulangan sejak dini terhadap masyarakat yang diberikan pelatihan dan pembinaan terkait penanggulangan bencana.

Prinsip-prinsip pelaksanaan program desa tangguh bencana menurut Perka BNPB No, 1 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Bencana Merupakan Tanggungjawab Bersama

Bencana alam adalah suatu peristiwa/serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu bencana alam bisa mendatangkan dampak bencana. Oleh sebab itu, diperlukan tanggungjawab bersama baik dengan pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan baik melalui pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

2. Berbasis Pengurangan Risiko

Berbasis pengurangan risiko adalah suatu kegiatan penanggulangan bencana yang memfokuskan pada kegiatan meminimalisir dampak risiko bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana. Kegiatan penanggulangan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana ini melibatkan beberapa kalangan baik dari pemerintah, non pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi ikut serta berpartisipasi dalam pengurangan risiko bencana pada tingkat Desa dengan melakukan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk mengurangi dampak risiko bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

3. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama

Dalam proses mewujudkan program desa tangguh bencana diperlukan masyarakat yang aktif yang menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Berlandaskan Kemanusiaan, Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam prinsip pelaksanaan Desa Tangguh Bencana pada dasarnya harus berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan gender guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemenuhan peningkatan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya manusia untuk dimanfaatkan dalam prinsip pelaksanaan Desa Tangguh Bencana. Dalam hal ini keadilan dan kesetaraan gender adalah salah satu yang termasuk dalam pemenuhan hak masyarakat dalam pelaksanaan Desa Tangguh Bencana guna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

5. Keberpihakan Kepada Kelompok Rentan

Dalam prinsip pelaksanaan Desa tangguh Bencana pada dasarnya dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana harus mementingkan keberpihakan masyarakat terhadap kelompok rentan. Oleh sebab itu kelompok rentan tersebut juga berhak menerima pengakuan dari masyarakat ketika terdampak bencana, maka pemerintah maupun masyarakat harus mementingkan keberpihakan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Adapun keberpihakan kelompok rentan adalah Balita, ibu hamil, lansia, dan anak kecil harus mendapatkan pertolongan utama dari pemerintah dan masyarakat ketika terjadi bencana.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana diperlukan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana di tingkat Desa melalui

Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat dapat memiliki sifat terbuka dalam melakukan penanggulangan bencana sehingga ketika terjadi bencana yang menimbulkan dampak bencana yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan harta benda dan fasilitas umum, maka pemerintah dan masyarakat bisa dapat menyampaikan informasi yang disampaikan berupa data-data dampak risiko dan kerugian akibat dampak bencana pada kalangan masyarakat umum.

7. Kemitraan

Dalam menjalankan suatu kegiatan penanggulangan bencana pada dasarnya diperlukan dengan adanya korelasi hubungan kerjasama berupa kemitraan antar instansi pemerintah ataupun lembaga daerah untuk bekerjasama untuk menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan. Program kegiatan yang mengutamakan kemitraan yang menjalin kerjasama antar individu, kelompok, atau organisasi-organisasi untuk melakukan program kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun upaya yang dilaksanakan dalam kerjasama antar instansi/lembaga meliputi persamaan (equality), keterbukaan (transparency), dan saling menguntungkan (mutual benefit). Prinsip ini sangat penting digunakan karena risiko bencana dapat terjadi dan berdampak pada masyarakat.

8. Diselenggarakan Secara Lintas Sektor

Pada dasarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kerjasama antar sektor yang

melibatkan instansi pemerintah, non pemerintah, sektor swasta dan perguruan tinggi yang ikut serta berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Sehingga dengan adanya penanggulangan yang diselenggarakan secara lintas sektor bisa dapat memenuhi kekurangan dan kelebihan dalam tahapan proses penanggulangan bencana pada suatu daerah yang terdampak. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara lintas sektor juga diperlukan dengan adanya koordinasi antar lintas sektor, hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar lintas sektor bisa dapat membantu daerah yang terdampak bencana ketika dalam keadaan darurat bencana atau dalam keadaan terdampak bencana. Hubungan yang bersifat kerjasama antar masyarakat dan lintas sektor ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki program mitigasi bencana kepada masyarakat agar tanggap dalam menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana serta mengurangi dampak dan menekan ancaman bencana yang terjadi.

BAB II

PROGRAM KESIAPSIAGAAN BENCANA

A. Pengertian Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna, yang termasuk dalam tindakan kesiapsiagaan yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil. Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Sebaiknya suatu kabupaten kota melakukan kesiapsiagaan (Purwoko dkk, 2015).

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU No. 24, 2007). Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat memengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap siaga dalam mengantisipasi bencana. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan didalam konsep bencana yang berkembang saat ini, pentingnya kesiapsiagaan merupakan salah satu

elemen penting dari kegiatan pencegahan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro- aktif, sebelum terjadinya suatu bencana (Nugroho, 2007).

Kesiapsiagaan adalah upaya untuk menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai bentuk sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi suatu bencana agar dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut dapat diminimalisir. Kesiapsiagaan adalah tindakan atau pun upaya yang dilakukan untuk mampu menanggapi kemudian meminimalisir dampak kerugian yang dihasilkan oleh suatu bencana (Paramesti, 2011; Nurhidayati and Ratnawati, 2018).

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, 2007). Menurut Carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan

untuk melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Menurut Yayasan IDEP dalam bukunya tentang penanggulangan berbasis masyarakat mendefinisikan tentang kesiapsiagaan yaitu upaya menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana. Contoh tindakan kesiapsiagaan (IDEP, 2007; Wahidah, 2016):

1. Pembuatan sistem peringatan dini,
2. Membuat sistem pemantauan ancaman,
3. Membuat sistem penyebaran peringatan ancaman,
4. Pembuatan rencana evakuasi,
5. Membuat tempat dan sarana evakuasi,
6. Penyusunan rencana darurat, rencana siaga,
7. Pelatihan, gladi dan simulasi atau uji coba g. Memasang rambu evakuasi dan peringatan dini.

Kesiapsiagaan masyarakat cenderung diabaikan oleh pemerintah yang akan membuat keputusan. Selama ini masih banyak masyarakat yang mengantungkan kesiapsiagaan dan mitigasi kepada pemerintah dengan mengabaikan kesiapsiagaan pribadi masing-masing.

B. Tujuan Kesiapsiagaan

Menurut IDEP (2007) menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu (IDEP, 2007):

1. Mengurangi ancaman, untuk mencegah ancaman secara mutlak memang mustahil, seperti gempa bumi dan meletus gunung berapi. Namun ada banyak cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ancaman atau mengurangi akibat ancaman
2. Mengurangi kerentanan masyarakat, kerentanan masyarakat dapat dikurangi apabila masyarakat sudah mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk melakukan tindakan penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat waktu. Masyarakat yang pernah dilanda bencana dapat mempersiapkan diri dengan melakukan kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan evakuasi, penyelamatan serta mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana.
3. Mengurangi akibat, untuk mengurangi akibat suatu ancaman, masyarakat perlu mempunyai persiapan agar cepat bertindak apabila terjadi bencana. Umumnya pada semua kasus bencana, masalah utama adalah penyediaan air bersih. Akibatnya banyak masyarakat yang terjangkit penyakit menular. Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber air bersih dapat mengurangi kejadian penyakit menular.

4. Menjalin kerjasama, tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan masyarakat, penanganan bencana dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau apabila diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk menjamin kerjasama yang baik, pada tahap sebelum bencana ini masyarakat perlu menjalin hubungan dengan pihak-pihak seperti Puskesmas, polisi, aparat desa atau kecamatan.

C. Indikator Kesiapsiagaan

Adapun indikator dalam menilai kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menurut Jan Sopaheluwakan dalam buku LIPI UNESCO/ ISDR (2006), yaitu (Sopaheluwakan and Dkk, 2006):

1. Parameter pertama adalah pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana. Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki individu maupun masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir maupun pegunungan yang rentan terhadap bencana alam.
2. Parameter kedua adalah kebijakan yang berkaitan sekali dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam yang akan terjadi maupun yang belum terjadi. Kebijakan dalam kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan merupakan upaya nyata untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana.

3. Parameter ketiga adalah rencana tanggap darurat. Rencana ini menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana, terutama yang berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban yang diakibatkan oleh bencana dapat diminimalisir. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan pasca bencana sebelum bantuan dari pemerintah maupun pihak luar datang.
4. Parameter keempat sangat berkaitan dengan sistem peringatan bencana diaman sistem ini meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Dengan adanya peringatan bencana ini, masyarakat dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi korban jiwa, harta benda dan kerusakan yang ditimbulkan dari adanya bencana. Oleh karena itu dibutuhkan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan dan kemana lalu bagaimana harus menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman.
5. Parameter kelima adalah mobilisasi sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia (SDM), pendanaan dan sarana prasarana penting untuk keadaan darurat merupakan potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya menjadi kendala dalam kesiapsiagaan bencana alam.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan adalah tindakan responsif dan solusi masyarakat terhadap bencana dengan mempersiapkan individu maupun

masyarakat untuk tanggap dalam menghadapi bencana agar menekan dampak negatif dari adanya bencana.

D. Sifat Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan suatu komunitas selalu tidak terlepas dari aspek-aspek lainnya dari kegiatan pengelolaan bencana (tanggap darurat, pemulihan dan rekonstruksi, pencegahan dan mitigasi). Untuk menjamintercapainya suatu tingkat kesiapsiagaan tertentu, diperlukan berbagai langkah persiapan pra-bencana, sedangkan keefektifan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat dari implementasi kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat pelaksanaan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana, harus dibangun juga mekanisme kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya (Sopaheluwakan and Dkk, 2006).

Selain itu juga perlu diperhatikan sifat kedinamisan dari suatu kondisi kesiapsiagaan suatu komunitas. Tingkat kesiapsiagaan suatu komunitas dapat menurun setiap saat dengan berjalannya waktu dan dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial-budaya, politik dan ekonomi dari suatu masyarakat. Karena itu sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengetahui kondisi kesiapsiagaan suatu masyarakat dan melakukan usaha-usaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan tersebut (Sopaheluwakan and Dkk, 2006; Adiwijaya, 2017).

E. Elemen-Elemen Penting Kesiapsiagaan

Dalam mengembangkan dan memelihara suatu tingkat kesiapsiagaan, berbagai usaha perlu dilakukan untuk mengadakan elemen-elemen penting berikut ini (Sopaheluwakan and Dkk, 2006):

1. Kemampuan koordinasi semua tindakan (adanya mekanisme tetap koordinasi).
2. Fasilitas dan sistim operasional.
3. Peralatan dan persediaan kebutuhan dasar atau supply.
4. Pelatihan.
5. Kesadaran masyarakat dan pendidikan.
6. Informasi.
7. Kemampuan untuk menerima beban yang meningkat dalam situasi darurat/krisis.

Khususnya fasilitas dan sistim operasional dari suatu kesiapsiagaan, perlu disediakan elemen- elemen yaitu, sistem komunikasi darurat/stand-by, sistem peringatan dini, sistem aktivasi organisasi darurat, pusat pengendalian operasi darurat (sebagai pusat pengelolaan informasi), sistem untuk survey kerusakan dan pengkajian kebutuhan, pengaturan untuk bantuan darurat (makanan, perlindungan sementara, pengobatan dan lainnya) (Sopaheluwakan and Dkk, 2006; Adiwijaya, 2017).

F. Upaya Kesiapsiagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut pasal 45 UU No.24/2007, upaya kesiapsiagaan dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut (Pemerintah Republik Indonesia, 2007):

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana,
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sitem peringatan dini,
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar,
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat,
5. Penyiapan lokasi evakuasi,
6. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana,
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Upaya kesiapsiagaan pada beberapa poin diatas tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi dapat juga dilakukan oleh individu atau masyarakat. Hal ini yang membedakan upaya kesiapsiagaan dengan upaya pengurangan resiko prabencana lainnya (mitigasi dan peringatan dini), dimana upaya kesiapsiagaan dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat.

BAB III

EVALUASI

A. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran dan pengembangan indikator, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses berkelanjutan, evaluasi menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut (Muryadi, 2017):

1. Membantu perencanaan di masa yang akan datang.
2. Mengetahui apakah sarana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
3. Menentukan kelemahan dan kekuatan daripada program, baik dari segi teknis maupun administratif yang selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan.
4. Membantu menentukan strategi, artinya mengevaluasi apakah cara yang telah dilaksanakan selama ini masih bisa dilanjutkan atau perlu diganti.
5. Mendapatkan dukungan dari sponsor (pemerintah atau swasta), berupa dukungan moral maupun material.

6. Motivator, jika program berhasil, maka akan memberikan kepuasan dan rasa bangga kepada para staf, hingga mendorong, mereka bekerja lebih giat lagi.

Penilaian sebagai salah satu fungsi manajemen bertujuan untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu perencanaan, sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan memakai ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perencanaan. Penilaian adalah suatu upaya untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan utama dari penilaian adalah agar hasil penilaian tersebut dapat dipakai sebagai umpan balik untuk perencanaan sebelumnya (Muryadi, 2017).

Sedangkan menurut Isbandi Rukminto, dengan mengutip pendapat Feurstein 1990 dalam bukunya yang berjudul pemberdayaan, pengembangan masyarakat, bahwa sekalipun tidak secara langsung menyebut sebagai tujuan dari pelaksanaan evaluasi, namun dia menyatakan ada 10 (sepuluh) alasan, mengapa suatu evaluasi perlu dilakukan, yaitu (Purwanto, 2009; Harjawati and Dkk, 2018):

1. Melihat apa yang sudah dicapai
2. Melihat kemajuan, dikaitkan dengan objek (tujuan) program
3. Agar tercapai manajemen yang baik
4. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan, untuk memperkuat program

5. Melihat perbedaan yang sudah terjadi setelah diterapkan suatu program
6. Melihat apakah biaya yang telah dikeluarkan cukup rasionable
7. Merencanakan dan mengelola kegiatan program secara lebih baik
8. Melindungi pihak lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama atau mengajak pihak lain untuk melaksanakan metode yang serupa bila metode tersebut telah terbukti berhasil dengan baik
9. Agar dapat memberikan dampak yang lebih luas, dan
10. Memberi kesempatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

B. Evaluasi Program

Evaluasi program, suatu istilah dalam manajemen yang populer beberapa dekade terakhir, bukanlah suatu hal yang baru, secara historis berkembang dan muncul dalam administrasi secara independen. Evaluasi kualitatif sering dianggap agak lunak dibandingkan dengan evaluasi kuantitatif yang bersifat teknis dan berorientasi pada pengamat, namun informasi kuantitatif bisa jadi tidak begitu dipahami oleh pembaca. Sebagian besar penulis sepakat bahwa evaluasi program adalah suatu fungsi yang bersifat spesialistik, baik evaluasi dalam dalam sistem manajemen (The World Bank, 2010).

Evaluasi program, suatu istilah dalam manajemen yang populer beberapa dekade terakhir, bukanlah suatu hal yang baru, secara

historis berkembang dan muncul dalam administrasi secara independen. Evaluasi kualitatif sering dianggap agak lunak dibandingkan dengan evaluasi kuantitatif yang bersifat teknis dan berorientasi pada pengamat, namun informasi kuantitatif bisa jadi tidak begitu dipahami oleh pembaca. Sebagian besar penulis sepakat bahwa evaluasi program adalah suatu fungsi yang bersifat spesialisik, baik evaluasi dalam dalam sistem manajemen (The World Bank, 2010).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan untuk menilai suatu obyek, program yang sedang berjalan atau telah berjalan dengan tujuan untuk mengetahui apakah program telah tercapai atau belum yang selanjutnya akan diketahui keberlanjutan program tersebut dengan cara mengambil kebijakan atau keputusan berdasarkan hasil yang ada. Tanpa adanya evaluasi maka faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan suatu program tidak dapat diketahui. Evaluasi program juga dijadikan sebuah cara untuk menganalisa keefektivan suatu program. Hal ini menjadikan suatu kegiatan evaluasi sangat penting untuk dilakukan.

C. Tujuan Evaluasi Program

Evaluasi bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini

pelaksanaan program dapat membuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui misalnya berapa jumlah tenaga yang perlu ditambahkan atau dikurangi, alat atau fasilitas apa yang perlu disiapkan untuk melaksanakan program tersebut, berapa lama tambahan waktu dibutuhkan, dan seterusnya. Sementara itu, Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan, dan terutama apa yang dapat diperbaiki pada program yang sama yang akan dilaksanakan di waktu dan tempat lain. Secara umum tujuan pelaksanaan evaluasi adalah (Slameto, 2019):

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana,
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi,
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek,
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,

5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

D. Tipe Evaluasi

Dalam kaitan dengan kegiatan evaluasi, Pietrzak, Ramles, Ford dan Gilbert 1990 mengemukakan tiga tipe evaluasi guna mengawasi suatu program secara lebih seksama, yaitu evaluasi input (masukan), evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Pendapat ini pun selaras dengan yang dikemukakan Isbandi Rukminto Adi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, beliau memaparkan bahwa istilah evaluasi memiliki dua makna yang berbeda. Bila evaluasi muncul bersama pemantauan (monitoring) maka evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi hasil. Pengertian kedua dari kata evaluasi adalah jika ia berdiri sendiri tanpa diikuti kata pemantauan, maka evaluasi yang dimaksud berarti evaluasi masukan (Input Evaluation), proses (Process Evaluation), dan evaluasi hasil (Output Evaluation) (Tayibnafis and Farida, 2000).

9. Evaluasi input Evaluasi input memfokuskan pada berbagai unsur yang masuk dalam suatu pelaksana suatu program. Unsur-unsur pada input yang ada di dalam program mencakup staf, partisipan program, sumber daya program, dan layanan-layanan lain yang mendukung jalannya program (Muryadi, 2017).
10. Evaluasi proses Evaluasi proses menurut Pietrzak, et, al 1990 memfokuskan diri pada aktivitas program yang melibatkan

interaksi langsung antara klien dengan staf, yang mana aktifitas tersebut adalah inti dari pencapaian tujuan program. Dalam evaluasi proses kita melihat seberapa baik pemberian layanan, apakah layanan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tipe evaluasi ini diawali dengan analisis dari sistem pemberian layanan, hasil analisis harus dikaji berdasarkan kriteria yang relevan seperti “standar praktek terbaik” (Best Practice Standards), kebijakan lembaga, tujuan proses (Process Goals) dan kepuasan klien (Muryadi, 2017).

11. Evaluasi hasil Sesuai yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Adi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, evaluasi hasil diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program terhadap penerima (masyarakat peserta program) sehingga pertanyaan utama pada evaluasi ini adalah kapan suatu program dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya.

E. Jenis Evaluasi

Terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif lebih menekankan dan untuk memperbaiki objek yang diteliti, dengan cara menilai kualitas pelaksanaan program dan konteks organisasi seperti personil, prosedur kerja, input dan sebagainya. Evaluasi formatif digunakan untuk feedback dari suatu

aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program atau produk yang berupa barang atau jasa. Adapun jika dikaitkan dengan pendekatan evaluasi formal, evaluasi formatif yaitu evaluasi yang meliputi usaha-usaha untuk secara terus-menerus memantau pencapaian tujuantujuan dan target formal (Ananda and Rafida, 2017).

E. Langkah-Langkah Evaluasi

Langkah yang mendasar diperlukan untuk evaluasi program dan hubungannya satu dengan yang lainnya sebagai berikut (Sudijono, 2007; Rusdiana and M., 2017):

1. Deskripsi program, tujuan dan sasaran spesifik

Langkah pertama dalam melaksanakan evaluasi program adalah untuk menghasilkan detail deskripsi program yang dimaksud, termasuk tujuan dan sasaran program. Ini mencakup apakah itu rencananya, sumber daya, proses pelaksanaan, keluaran, efek bahkan dampak suatu kegiatan serta pengaruh terhadap lingkungan yang luas.

2. Penetapan kriteria untuk evaluasi

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan dan program telah dideskripsikan cukup detail dan seluruhnya, kriteria evaluasi bisa ditetapkan berdasarkan yaitu kriteria yang melekat pada rencana program yang telah dibuat sebelumnya, disini evaluasi akan lebih mudah. Jika sasaran untuk program berdasar kriteria dari referensi ilmiah tertentu, kriteria evaluasi perlu disesuaikan. Jika sasaran tidak

tertulis dengan kriteria implisit untuk evaluasi, kriteria harus dikembangkan. Kunci untuk mengembangkan kriteria evaluasi bermanfaat untuk mendesain sehingga ukuran, data yang diperlukan, dan interpretasinya jelas.

3. Pemilihan desain evaluasi

Desain evaluasi menyesuaikan program yang bersangkutan. Berbagai desain berbeda bisa diterapkan untuk evaluasi program. Karena biasanya evaluasi terfokus pada satu atau beberapa aspek, sehingga desain evaluasi harus diseleksi dan ditetapkan termasuk semua tugas dan isu yang berkaitan dengan evaluasi.

12. Pengumpulan data untuk penilaian

Sebelum pengumpulan data terlebih dulu menyusun instrumen dan rencana pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data untuk menilai perkembangan program berkaitan dengan kriteria evaluasi dan desain evaluasi yang telah ditetapkan

13. Analisis data

Analisis terhadap data yang dikumpulkan dibandingkan dengan kriteria evaluasi dapat dilakukan analisis deskriptif atau analisis inferensial sesuai maksud dan tujuan serta desain evaluasinya. Analisis harus menunjukkan dimana program yang memenuhi kriteria untuk keberhasilan, dan harus juga mengidentifikasi komponen yang butuh peningkatan.

14. Membuat kesimpulan dan pelaporan

Laporan evaluasi program harus dibuat untuk menjelaskan bagaimana program dievaluasi, apakah pertanyaan yang ditujukan, dan apakah hasil akhirnya. Informasi yang dihasilkan dari proses evaluasi ini disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Hal ini umumnya penting untuk membahas efek program yang mempunyai target populasi dan rencana kelanjutannya, berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran program.

BAB IV

EVALUASI PROGRAM KESIAPSIAGAAN KEGIATAN DESA TANGGUH BENCANA

Evaluasi berdasarkan standar dan perbandingan yaitu perbandingan antara hasil yang direncanakan atau dikerjakan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi program kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian dan mengidentifikasi keterbatasan dari program kesiapsiagaan. Dengan demikian, evaluasi ditujukan terhadap dua hal yaitu untuk mengukur kemajuan rencana dan program (evaluasi formatif) dan untuk mengukur hasil pencapaian kegiatan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan (evaluasi sumatif). Untuk itu diperlukan indikator-indikator, yang sejak awal perencanaan program telah ditetapkan sebagai berikut (Rusdiana and M., 2017).

A. Input

Unsur input dalam evaluasi program kesiapsiagaan terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), pendanaan, sarana prasarana, peralatan/bahan paket, metode/cara penyelenggaraan, sasaran dan target waktu pencapaian hasil. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud terkait pelaksanaan program kesiapsiagaan ditinjau berdasarkan jumlah, latar belakang pendidikan, lama bekerja, dan pelatihan yang pernah diikuti. Terkait pendanaan, sarana prasarana,

dan bahan paket ditinjau menurut sumber dan jumlah yang tersedia. Sedangkan cara penyelenggaraan, sasaran dan target waktu pencapaian hasil disesuaikan dengan panduan program kesiapsiagaan.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Individu yang menjadi anggota organisasi atau institusi (pemegang program Kesiapsiagaan, kepala bagian bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)), fasilitator untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manajemen pelayanan penanggulangan bencana.

2. Dana

Dana ialah biaya operasional yang di butuhkan dan dipersiapkan untuk merealisasikan yang telah direncanakan sebelumnya mulai tahap awal perencanaan sampai tahap akhir kegiatan dalam program. Dana yang dimaksud biaya operasional yang di butuhkan dan dipersiapkan untuk merealisasikan yang telah direncanakan sebelumnya mulai tahap awal perencanaan sampai tahap akhir kegiatan dalam program. Sumber dana untuk pelaksanaan program kesiapsiagaan pada kegiatan desa tangguh bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar berasal dari dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada anggaran. Termasuk dana program kesiapsiagaan pada kegiatan desa tangguh bencana bersumber dari alokasi dana tersebut. Besar dana operasional yang diberikan tidak sama menurut jumlah desa/kelurahan yang menjadi

tanggung jawab BPBD Kabupaten Banjar masing-masing (BNPB, 2011).

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah perlengkapan, alat dan fasilitas penunjang untuk menjalankan suatu kegiatan atau program guna mencapai suatu tujuan desa tangguh bencana. Pendukung kegiatan sumber daya manusia. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk efisiensi karena sebagai media yang menopang kerja manusia. Jika sumber daya manusia yang cukup dan adanya sumber daya sarana dan prasarana yang memadai maka akan menghasilkan organisasi yang efektif. Untuk pendekatan proses berkaitan dengan proses pelaksanaan/mekanisme. Sedangkan pendekatan sasaran terdiri dari tiga indikator yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial (Aini, Ulfah and Afala, 2018).

4. Metode

Metode yaitu cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran, yakni berupa seperangkat cara yang tersusun secara sistematis dan digunakan untuk cara kerja dalam proses mencapai tujuan pelaksanaan program kesiapsiagaan yang ditunjang oleh standar operasional prosedur (SOP) atau petunjuk teknis yang telah tersedia. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tingkat ketangguhan sebuah desa/kelurahan dalam menghadapi bencana dibagi kedalam

tiga kriteria adalah sebagai berikut (BNPb, 2011; Aini, Ulfah and Afala, 2018):

- a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Adanya kebijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau perangkat hukum setingkat di kelurahan.
 - 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah dipadukan ke dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
 - 3) Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan, yang berfungsi dengan aktif.
 - 4) Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya
 - 5) Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan

- 6) Adanya upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana
- b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama (skor 51-60) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa/kelurahan.
 - 2) Adanya dokumen perencanaan PB yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.
 - 3) Adanya Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif.
 - 4) Adanya Tim Relawan PB Desa/Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif.
 - 5) Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
 - 6) Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.

c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama (skor 20-35) dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa/kelurahan.
- 2) Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
- 3) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
- 4) Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Tim Relawan PB Desa/Kelurahan.
- 5) Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
- 6) Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana

Beberapa penelitian mengatakan tentang evaluasi program kesiapsiagaan terhadap Desa Tangguh Bencana, diantaranya :

- 1) Berdasarkan dari penelitian Ainun Najib (2021) mengatakan guna meningkatkan kemampuan dalam pengurangan risiko bencana banjir, Desa Buluh Cina telah aktif melakukan pelatihan rutin dan berkelanjutan setiap tahun sebagai usaha peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir. Dari pelatihan tersebut terdapat indikator keberhasilan program desa tangguh bencana dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun

evaluasi dalam upaya pengurangan risiko bencana (Ainun N, 2021).

- 2) Berdasarkan dari penelitian I Putu Wahyu Wedanta Pucangan (2020) mengatakan berdasarkan aspek Desa Tangguh Bencana dikategorikan demikian karena dari 4 aspek legilasi, perencanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilaksanakan, aspek kelembagaan sudah dibentuk keanggotaannya, sedangkan aspek pendanaan belum ada alokasi anggaran maupun dana khusus yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten-Desa (Pucangan IPWW, 2020).
- 3) Berdasarkan dari penelitian Sri Suparti (2020) mengatakan Program Pengabdian Pengembangan Desa Mitra (PPDM) memberikan kontribusi berupa Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana baik bencana alam ataupun non alam, dokumentasi pemetaan kebencanaan desa Melung, tersedianya sarana dan prasarana simulasi kesiapsiagaan bencana dan tersusunya Rencana strategis desa siaga bencana. Perlu dilanjutkan kembali untuk program- program yang telah direncanakan terkait pengembangan Desa siaga Bencana menjadi desa tangguh bencana (DESTANA) sehingga pengembangan dengan keunggulan kebencanaan tercapai sekaligus menjadi Desa Binaan dan percontohan (Suparti, 2020).

- 4) Berdasarkan dari penelitian Nur Aini (2018) mengatakan bahwa efektivitas program desa tangguh bencana di Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 2017 dilihat dari pendekatan sumber, pelaksanaan, dan sasaran dapat dikatakan belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti kurang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada di tingkat desa, Sehingga berdampak pula pada pelaksanaan penanggulangan bencana. Selain sumber daya manusia, minimnya sumber daya anggaran yang dimiliki Desa Sirnobojo tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dan penanggulangan bencana (Aini Nur, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, C. (2017) „Pengaruh Pngetahuan Kebencanaan dan Sikap Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Tanah Longsor (Studi di Kelurahan Lawanggingtung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor)“, Jurnal Prodi Manajemen Bencana.
- Aini, N., Ulfah, I. F. and Afala, L. M. (2018) „Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Di Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2017“, Journal of Governance and Policy.
- BNPB (2011) „Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana“, pp. 1–9.
- Harjawati, T. and Dkk (2018) „Pemberdayaan Ibu-Ibu rumah Tangga Melalui Modifikasi Jilbab anak Untul Meningkatkan ekonomi Keluarga Di Desa Rocek“, SEMBADHA, 10(1), pp. 108–116.
- IDEP (2007) Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Panduan Umum.

Muryadi, A. D. (2017) „Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi“, Jurnal Ilmiah PENJAS.

Najib A, Hayatul KR. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Buluh Cina, Siak Hulu, Kampar, Riau. JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. 5(1):14-23.

Nugroho, C. (2007) Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami Di Nias Selatan. Jakarta: UNESCO.

Nurhidayati, I. and Ratnawati, E. (2018) „kesiapsiagaan keluarga dengan lanjut usia pada kejadian letusan merapi di desa belerante kecamatan kemalang“, Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama. doi: 10.31596/jcu.v0i0.210.

Pucangan IPWW, Wajyudi A. (2020). Evaluasi pengembangan kapasitas masyarakat sebagai desa tangguh bencana di desa lebih, Gianyar, Bali. PRANATACARA BHUMANDALA: Jurnal Riset Planologi. 1(1):51-61.

Purwanto (2009) Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rusdiana and M., N. (2017) Manajemen Evaluasi Program Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sopaheluwakan and Dkk (2006) Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi & Tsunami. Jakarta: LIPI.

Sudijono, A. (2007) Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suparti S, Inggar RK, Kurnia D. (2020). Pemberdayaan masyarakat desa melung dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana sebagai perwujudan Desa Siaga Bencana. SEMNAS LPPM 2020. pp 54-58.

Tayibnafis and Farida, Y. (2000) Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahidah, D. A. (2016) „Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Perawat 43 dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember“, Jurnal Pustaka Kesehatan.

RIWAYAT PENULIS



Husaini, lahir di Tanjung-Tabalong, 16 Juni 1966 dari enam saudara. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar Bidang Ilmu Kesehatan Lingkungan/Kesehatan kerja (1995), S2 di Universitas Airlangga Surabaya Bidang Ilmu Kesehatan Kerja (2000), dan S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Bidang Ilmu Kesehatan Kerja (2000), dan sekarang menjadi pengajar tetap di Prodi S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, juga aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta. Dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat oleh rektor Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 18 Agustus 2017 di Banjarmasin.



Syamsul Arifin, Lahir di Daha Utara 18 Februari 1975. Tahun 1993 memulai pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran ULM dan mendapatkan gelar dokter tahun 2000. Tahun 2006 melanjutkan

pendidikan Pasca Sarjana manajemen Pendidikan ULM dan mendapatkan gelar Magister pendidikan tahun 2008. Pada tahun 2011 oleh Kolegium Dokter Indonesia mendapatkan sertifikasi sebagai Dokter Layanan Primer (DLP). Pada tahun 2018 mendapatkan gelar Doktor ilmu Kesehatan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Bulan Juli 2020 dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM. Pengalaman Pekerjaan pada tahun 2001, menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pasungkan. Tahun 2002 menjabat sebagai Kepala Puskesmas Rawat Inap Negara. Sejak tahun 2003 menjadi staff pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. khususnya pada bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat. Tahun 2009-

2012 dipercaya sebagai Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan FK ULM., Tahun 2012-2016 dipercaya sebagai Pembantu Dekan II FK ULM. Tahun 2014-2015 dipercaya juga dipercaya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat FK ULM. Tahun 2018 sampai sekarang dipercaya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya. Tidak hanya di institusi pendidikan juga aktif di organisasi koalisi Kependudukan Kalimantan Selatan sebagai ketua Seksi Kesehatan sejak 2012.



Agung Biworo, lahir di Sleman 08 Agustus 1966, Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Bidang Ilmu Kedokteran Umum (1995) dan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Bidang Ilmu Farmakologi (2000), Penulis aktif sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dengan Mata Kuliah yang di ampu Farmakologi Dan Terapi, Dasar-Dasar Kesehatan Kerja, Ergonomi Dan Faal

Kerja, Farmakologi Keperawatan. Selain itu, Penulis aktif sebagai tim penyusun produk bahan ajar/modul kegiatan, kegiatan- kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tim penulis jurnal nasional dan Internasional, penulisan makalah dan poster, khususnya yang terkait dengan ilmu Pendidikan Dokter.



Lenie Marlinae, lahir di Manusup, 12 April 1977. Pendidikan terakhir lulusan Pasca sarjana Kesehatan Masyarakat- UNAIR lulus tahun 2002, dan sekarang menjadi pengajar tetap di

Prodi S1 dan S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNLAM Kalimantan Selatan. Pengalaman penelitian pengabdian di bidang Kesling, Gizi dan AKK. Penelitian bidang kesling terkait pengolahan air bersih di lahan basah, penelitian di bidang Gizi terkait stunting, BBLR dan pembuatan program 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam upaya menanggulangi masalah stunting. Penelitian AKK

terkait program manajemen rumah tinggal untuk penderita TB dan penderita stunting. Sekarang penulis menjabat sebagai dosen pengajar di program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan program studi S2 IKM Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Selain itu penulis juga menjabat sebagai lektor kepala pada Fakultas Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat. Penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang Kesmas melalui hibah penelitian DIKTI, Litbangkes dan aktif dalam kegiatan RISKESDAS. Penulis juga aktif menghasilkan karya publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional dan nasional. Penulis merupakan anggota aktif dari organisasi profesi AIPTKMI Pusat dan IAKMI KalSel, PERMI, Perhimpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.



Tien Jubaidah, lahir di banjarbaru 04 November 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (2003), S2 Kesehatan lingkungan Universitas Airlangga (2011), S3 Teknik Lingkungan Institut Sepuluh Nopember (2019) Penulis aktif sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Banjarmasin, penulis aktif sebagai tim penyusun produk bahan ajar/modul kegiatan, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tim penulis jurnal nasional dan Internasional, penulisan makalah dan poster, hhususnya yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan.



Laily Khairiyati, lahir di Banjarmasin, 25 Maret 1984. Pendidikan terakhir lulusan Pasca sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat-UGM lulus tahun 2012, dan sekarang menjadi pengajar tetap di Prodi S1 Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM Kalimantan Selatan. Saat ini, selain sebagai staf pengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) FK ULM dibawah departemen Kesehatan Lingkungan, juga dipercaya sebagai Sekertari program Studi. Pengalaman penelitian pengabdian di bidang Kesling, Gizi dan AKK. Penelitian bidang kesling terkait pengolahan air bersih di lahan basah, penelitian di bidang Gizi terkait stunting, BBLR dan pembuatan program 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam upaya menanggulangi masalah stunting.



Agung Waskito, Lahir di Rantau 12 Agustus 1990. Pada tahun 2008, memulai pendidikan Sarjana di Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan mendapatkan gelar Sarjana

Teknik (ST) pada tahun 2013. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan mendapatkan gelar Magister Teknik (MT) pada tahun 2017. Saat ini, selain sebagai staf pengajar di Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) FK ULM dibawah departemen Kesehatan Lingkungan, juga dipercaya sebagai Sekertaris Unit Pelaksana Konseling dan Bimbingan Karir, anggota Unit Pelaksana Kemahasiswaan dan Kerjasama, anggota Unit Pelaksana Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menjadi anggota Unit Pelaksana Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (JPKMI) di Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) FK ULM. Selain itu, Ia aktif sebagai tim penyusun

produk bahan ajar/modul kegiatan, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tim penulis jurnal nasional, penulisan makalah dan poster, hhususnya yang terkait dengan kesehatan Lingkungan.



Anugrah Nur Rahmat,

Lahir di Banjarmasin 8

November 1994. Penulis

menyelesaikan pendidikan

Diploma 3 (D3) di Program

Studi Kesehatan

Lingkungan Politeknik

Kesehatan Banjarmasin dan

mendapatkan gelar Ahli Madya Kesehatan

Lingkungan (AMKL) tahun 2014, S1 di Program

Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran

Universitas Lambung Mangkurat dan mendapatkan

gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) tahun

2019, dan Melanjutkan S2 di Program Studi Magister

Ilmu kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran

Universitas Lambung Mangkurat. Saat ini, selain

sebagai staf pengajar di Program Studi Kesehatan

Masyarakat (PSKM) FK ULM dibawah departemen

Kesehatan Lingkungan, Penulis di percaya sebagai

Analisis Laboratorium Terpadu Kesehatan Masyarakat, Sekretaris Unit ICT di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Anggota Unit Pelaksana Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia (JPKMI), Anggota Unit Pelaksana Konseling dan Bimbingan Karir Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Penulis juga aktif di organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), serta Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). Penulis Aktif sebagai tim penyusun produk bahan ajar/modul kegiatan, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tim penulis jurnal nasional dan Internasional, penulis makalah dan poster, khususnya yang terkait dengan Kesehatan Lingkungan.



Sherly Theana, lahir di Kertak Hanyar, 21 Desember 1996. Pada tahun 2015 memulai pendidikan sarjana pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung

Mangkurat (PSKM FK ULM) dengan memilih

peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) sebagai spesifikasi peminatan, kemudian lulus pada tahun 2021. Selama menyelesaikan masa studi, ia aktif berorganisasi dalam Forum Studi Ilmiah Mahasiswa (FSIM) FK ULM, berprestasi dalam bidang ilmiah seperti usulan PKM Gagasan Tertulis didanai Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 2018 dan menjadi Oral Presentator Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-30, Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017.



Taufik lahir di Rantau Kujang
2 November 1999. Pada tahun
2017. Memulai Pendidikan
Sarjana di Program Studi
Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kedokteran Universitas
Lambung Mangkurat (ULM)

hingga sekarang, memilih peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai spesifikasi dari jurusan yang diminati. Selain sebagai seorang mahasiswa PSKM FK ULM, ia juga pernah aktif di organisasi internal kampus, yaitu menjadi Anggota ICT HIMA KESMAS FK ULM 2018-2019, Koordinator ICT HIMA KESMAS FK ULM periode 2019-2020 serta pernah menjadi Anggota *Medical Football Club* (MFC) FK ULM periode 2019-2020.



Andre Yusufa Febriandy lahir di Sampit, 04 Februari 1999. Pada tahun 2017 memulai Pendidikan Sarjana di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM), memilih peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) sebagai spesifikasi dari jurusan yang diminati dan lulus pada tahun 2021. Selama menjadi seorang mahasiswa PSKM FK ULM, ia pernah aktif di organisasi internal kampus, yaitu menjadi Anggota Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi (PSDMO) HIMA KESMAS FK ULM 2018-2019, Bendahara 2 HIMA KESMAS FK ULM periode 2019-2020 serta pernah menjadi Anggota Kelompok Studi Islam (KSI) Asy-Syifa FK ULM periode 2018-2020.



M Gilmani lahir di Banjarmasin, 22 Oktober 1998. Pada tahun 2017 memulai Pendidikan Sarjana di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas

Lambung Mangkurat (ULM), memilih peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selama menjadi seorang mahasiswa PSKM FK ULM, ia pernah aktif di organisasi internal kampus, yaitu menjadi Anggota Divisi Pengabdian Masyarakat HIMA KESMAS FK ULM 2018-2019, wakil Ketua HIMA KESMAS FK ULM periode 2019-2020.



Winda Saukina Syarifatul

Jannah lahir di Blitar, 19 September 1999. Pada tahun 2017 memulai Pendidikan Sarjana di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran

Universitas Lambung Mangkurat (ULM), memilih peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) sebagai spesifikasi dari jurusan yang diminati dan lulus pada tahun 2021. Selama menjadi seorang mahasiswa PSKM FK ULM, ia pernah aktif di organisasi internal kampus, yaitu menjadi Anggota Divisi Kewirausahaan (KWU) HIMA KESMAS FK ULM 2018-2019, Bendahara 1 HIMA KESMAS FK ULM periode 2019-2020 serta pernah menjadi Anggota Forum Studi Ilmiah Mahasiswa (FSIM) FK ULM periode 2019-2020.



Ammara Ulfa Azizah lahir di Balikpapan, 10 Juli 2000. Pada tahun 2018, memulai pendidikan Sarjana di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) hingga sekarang, memilih peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) sebagai spesifikasi dari jurusan yang digelutinya. Selain sebagai seorang mahasiswa PSKM FK ULM, ia juga pernah aktif di organisasi internal kampus, yaitu menjadi Koordinator Divisi Penelitian & Pengabdian Masyarakat di Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat.



Raudatul Jinan lahir di Kandangan 27 September 2000. Pada tahun 2018 memulai pendidikan Sarjana di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) hingga sekarang, memilih peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) sebagai spesifikasi dari jurusan yang digelut. Selain sebagai mahasiswa PSKM FK ULM, ia juga aktif di organisasi internal kampus, yaitu menjadi Koordinator Divisi Media Information di *Medical International Society* FK ULM periode 2020-2021 dan anggota di Divisi *Information, Communication and Technologies* di Himpunan Mahasiswa PSKM FK ULM periode 2020-2021.